

REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM TUTURAN ELIT POLITIK PASCAREFORMASI: Pilihan Kata dan Bentuk Gramatikal

Johar Amir*
Universitas Negeri Makassar
johar.amir.unm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini secara umum bertujuan mendeskripsikan representasi kekuasaan elit politik pada tataran nasional seperti (1) mendeskripsikan pilihan kata yang dituturkan elit politik dalam merepresentasikan kekuasaannya dan (2) mendeskripsikan bentuk-bentuk gramatikal yang digunakan elit politik. Data dalam penelitian ini adalah tuturan elit politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah elit politik tingkat nasional. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pilihan kata yang digunakan elit politik meliputi penggunaan istilah asing, penggunaan kelompok kata bidang politik, dan penggunaan struktur kalimat meliputi modus kalimat, metafora, perumpamaan, klimaks, dan repetisi.

Kata kunci: *kekuasaan, pengungkapan, elit politik*

Abstract

The qualitative research is aimed at describing the power representation of the political elite at the national level through: (1) word choices expressed by the political elite in representing their power, and (2) grammatical forms used by the political elite. The data of the research were the words of the political elite at the national level in Indonesia. The findings show that the word choice used by the political elite involved the use of foreign terms, word classification in the political field, and sentence structures containing sentence modes, metaphors, parables, climaxes, and repetitions.

Keywords: *power, expression, political elite*

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, teknologi, kesehatan, olah raga, dan sosial budaya. Bidang kehidupan yang menarik perhatian dan mendapat banyak sorotan adalah bidang politik. Hal itu menjadi sorotan dan menarik karena terkait dengan kekuasaan. Khususnya pada era reformasi ini, banyak orang yang tergiur dengan kekuasaan, terutama politisi.

Oleh karena itu, era reformasi membawa banyak pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal mengemukakan pendapat. Saat ini siapa saja yang ingin mengemukakan pendapat bebas mengutarakannya. Tampaknya pada era reformasi ini perilaku masyarakat Indonesia sudah berubah dari penakut berbicara menjadi pemberani. Pada masa orde lama dan orde baru, masyarakat sangat dibatasi dalam hal mengemukakan pendapat. Kini, pada era reformasi telah ada kemajuan, masyarakat bebas mengutarakan pendapat. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, masyarakat dan politisi sangat antusias mengemukakan pendapatnya. Misalnya, kasus Bank Century, Badan Kehormatan DPR, hukuman pancung TKI, wisma atlet, surat palsu, dan kasus Nazaruddin dikomentari masyarakat dan politisi.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan tersebut, elit politik dan pemerintah menggunakan berbagai gaya berbahasa dalam mengurus bangsa dan negara yang tercinta ini. Selanjutnya, elit politik yang tidak sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan bebas memberikan komentar terhadap hal-hal yang dianggap keliru dan merugikan negara. Berkaitan dengan itu, elit politik dan pengamat politik berbekal keberanian dan kemampuan berbahasa tetap memberikan komentar terhadap apa saja yang dilakukan pemerintah. Tentu ada pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. Kedua belah pihak saling melontarkan pernyataan dengan berbagai gaya berbahasa. Ada yang menggunakan tuturan yang halus, ada yang menggunakan gaya perbandingan, klimaks, sindiran, istilah asing, kritikan, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam aktivitas manusia sehari-hari, termasuk yang berkaitan dengan kekuasaan (politik).

Penulis pernah melakukan penelitian yang sejenis dalam bidang wacana, khususnya wacana kritis dengan judul "Representasi Tuturan Elit Politik Sulawesi Selatan". Hasil penelitian tersebut pada tahun 2009 menunjukkan bahwa elit politik mengeluarkan banyak pernyataan yang berisi janji-janji, sindiran, kritikan, sanggahan, dan ajakan. Penelitian itu belum tuntas karena baru pada tingkat provinsi. Penulis ingin mengetahui tuturan politik secara nasional. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melanjutkan penelitian ini dalam bidang wacana, khususnya kajian analisis wacana kritis, namun dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu tuturan elit politik pada tataran nasional.

Bahasa sebagai Semiotik Sosial

Halliday (1985) memberi penekanan pada konteks sosial bahasa, yaitu fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan perkembangannya. Bahasa sebagai salah satu sistem makna secara bersama-sama dengan sistem tradisi, sistem mata pencaharian, dan sistem sopan santun membentuk budaya manusia.

Selanjutnya, menurut Halliday (1978), bahasa merupakan produk proses sosial. Seorang anak yang belajar bahasa dalam waktu yang sama belajar sesuatu yang lain melalui bahasa, yakni membangun gambaran realitas di sekitar dan di dalamnya. Tidak ada fenomena bahasa yang vakum sosial, tetapi itu selalu berhubungan erat dengan aspek-aspek sosial. Dalam proses sosial ini, menurut Halliday, konstruk realitas tidak dapat dipisahkan dari konstruk sistem semantis tempat realitas itu dikodekan.

Halliday (1978) menyatakan bahwa kajian bahasa sebagai semiotika sosial mencakup subkajian tentang teks, konteks situasi, register, kode, sistem linguistik, dan struktur sosial.

Tindak Ujaran

Tindak ujaran merupakan tataran yang berupa unit fungsional dalam komunikasi. Makna tindak ujar menekankan kekuatan pragmatik ujaran. Kemampuannya tidak hanya mendeskripsikan dunia, tetapi juga mengubah dunia dengan menyandarkan diri pada masyarakat umum beserta konvensi-konvensinya (Austin, 1978). Selanjutnya, menurut Fairclough (1989), nilai tindak ujaran tidak dapat dinilai begitu saja dari dasar fitur-fitur formal tuturan, tetapi harus juga mengambil laporan konteks tuturan tekstual, konteks situasional dan antarteks, serta elemen-elemen sumber materi partisipan.

Austin (1978) mengemukakan bahwa ada tiga jenis tindak ujaran, yaitu:

1. tindak lokusi yang merupakan tindak menyatakan sesuatu yang bermakna dan dapat dipahami,
2. tindak ilokusi yang merupakan tindak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan yang dikerjakannya berdasarkan tindak mengatakan sesuatu,
3. tindak perlokusi yang merupakan efek atau akibat yang dihasilkan penutur dari mengatakan sesuatu.

Sehubungan dengan tindak ujaran Fairclough (1989), ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu konvensi-konvensi tindak ujaran yang mewujudkan representasi ideologis subjek dan hubungan sosialnya. Hak-hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara subjek

mungkin saja ditanamkan dalam ”hak-hak yang tidak seimbang” dalam mengajukan pertanyaan, tindakan permintaan, mengadu serta ”kewajiban yang tidak seimbang” untuk menjawab, bertindak, dan menjelaskan tindakan seseorang.

Hakikat dan Jenis-jenis Tindak Tutur

Pada hakikatnya, tuturan adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih. Lane (dalam Richard, 1995) menguraikan beberapa hal tentang tujuan percakapan, yakni sebagai pertukaran informasi, memelihara tali persahabatan sosial dan kekerabatan, negosiasi status dan penampilan keputusan, serta pelaksanaan tindak bersama. Tujuan-tujuan itu diwujudkan melalui tindak tutur.

Filosof yang tertarik dengan penggunaan bahasa sudah lama menyadarinya. Oleh karena itu, pada tahun 1930 mulai berkembang doktrin positivisme. Doktrin tersebut menyatakan bahwa suatu kalimat dianggap benar jika kalimat tersebut dapat diuji nilai benar dan salahnya (Levinson, 1985). Doktrin tersebut mengisyaratkan bahwa semua tuturan seolah-olah hanya untuk menyampaikan makna proposisi. Padahal, ada makna lain yang terungkap dalam tuturan, misalnya makna afektif dan makna sosial. Bahkan, tuturan bukan hanya sekadar alat pengungkap makna-makna tersebut, tetapi sekaligus sebagai tindakan.

Setiap aktivitas komunikasi, peserta komunikasi selalu terkait dengan tuturan. Apabila tuturan dianggap sebagai tindakan, itu berarti bahwa setiap terjadi kegiatan bertutur terjadi pula tindak tutur. Dengan demikian, tindak tutur dapat diuraikan sebagai hal yang dilakukan peserta komunikasi ketika bertutur. Secara terminologis, tindak tutur didefinisikan sebagai unit terkecil aktivitas bertutur yang memiliki fungsi (Richard, 1955).

Van Ek (dalam Hatch, 1992) mengemukakan enam fungsi tindak tutur, yaitu:

1. tukar-menukar informasi faktual, misalnya mengidentifikasi, bertanya, melaporkan, dan mengatakan,
2. mengungkapkan informasi intelektual, misalnya setuju/tidak setuju, tahu/tidak tahu, dan ingat/tidak ingat,
3. mengungkapkan sikap emosi, misalnya berminat/kurang berminat, heran/tidak heran, takut, cemas, dan simpati,
4. mengungkapkan sikap moral, misalnya meminta maaf/memberi maaf, setuju/tidak setuju, menyesal, acuh,
5. meyakinkan/mempengaruhi, misalnya menyarankan, menasihati dan memberi peringatan,
6. sosialisasi, misalnya memperkenalkan, menarik perhatian, dan menyapa.

Wacana Politik

Politik selalu terkait dengan kekuasaan. Penggalangan kekuasaan dan penegakan terhadap keyakinan-keyakinan politik oleh Thomas dan Wareing (2007) dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Mencari kekuasaan lewat kekerasan. Ada banyak kejadian penting dalam sejarah terjadinya pemaksaan lewat kekuasaan kelompok yang satu kepada kelompok yang lain.
2. Membujuk orang untuk patuh secara suka rela. Dengan kata lain “melaksanakan kekuasaan lewat penciptaan persetujuan... atau setidaknya menciptakan kerelaan untuk membiarkan kekuasaan itu berjalan” (Fairclough 1989:4).

Selanjutnya, menurut Raharjo (2007), secara teoretik wacana politik menunjuk pada teks yang di dalamnya terkandung makna ideologis yang berkaitan dengan hubungan dominasi atau kekuasaan dari satu kelompok/kelas atau suatu lembaga atas kelompok/kelas atau lembaga lainnya. Selanjutnya, dikatakan bahwa secara sederhana politik bisa diartikan sebagai kegiatan seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan atau mengendalikan kekuasaan, maka wacana politik adalah ujaran/tulisan yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan atau mengendalikan kekuasaan.

Weedom dalam Raharjo (2007) berpendapat bahwa wacana politik merujuk pada berbagai cara yang tersedia untuk berbicara atau menulis untuk menghasilkan makna yang di dalamnya melibatkan beroperasinya kekuasaan untuk menghasilkan objek dan efek tertentu.

Sehubungan dengan pendapat di atas, Foucault (1972) berpendapat bahwa kekuasaan adalah relasi yang dibentuk dan disebarluaskan melalui banyak saluran, dengan cara yang kadang-kadang bersifat kontradiktif dan penuh persaingan, serta pada umumnya tumpang tindih.

Itulah sebabnya, ketika melihat wacana menurut Van Dijk dan Stubbs (1985), permasalahan yang penting bukan sekadar memahami bagaimana satu peristiwa dan objek wacana dipahami maknanya, melainkan juga memahami jenis kekuasaan yang beroperasi dan apa efek dari kekuasaan tersebut. Jelaslah, menurut Stubbs (1997), wacana politik merupakan tempat beroperasinya relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dengan demikian, studi wacana hakikatnya adalah upaya memahami apa yang dikatakan orang.

Bahasa dan Kekuasaan

Bahasa Indonesia adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai alat, bahasa Indonesia pada hakikatnya dianggap bersifat netral baru bersifat baik atau tidak baik jika digunakan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, pemakai bahasa Indonesia bebas menggunakannya, misalnya dengan cara menyampaikan, mengajak, menyindir, mengejek, menuding, mempengaruhi, mengkritik, merespon, atau menyusun bahasa yang indah.

Menurut Raharjo (2007), dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan diartikan sebagai setiap kemampuan, kapasitas dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga dan institusi untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain. Di lain pihak, Fairclough (1995) menyatakan bahwa pilihan bahasa dipandang sebagai praktik kekuasaan. Pemakaian bahasa membawa nilai ideologis tertentu yang dapat dianalisis secara menyeluruh. Ditambahkannya bahwa hegemoni lebih menekankan pada teori kekuasaan dengan pemahaman bahwa kekuasaan suatu komunitas yang dominan dapat menguasai komunitas yang lain.

Umumnya masyarakat mengetahui bahwa setiap penguasa selalu ingin mempertahankan kekuasaan yang diperolehnya. Pemertahanan tersebut berbentuk pemapanan dan pengukuhan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap penguasa selalu mengadakan konsolidasi kekuasaan di berbagai bidang yang terkait dengan kekuasaannya dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi.

Politik selalu terkait dengan kekuasaan. Penggalangan kekuasaan dan penegakan keyakinan-keyakinan politik dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Mencari kekuasaan melalui kekerasan. Ada banyak kejadian penting dalam sejarah sebagai tempat terjadinya pemaksaan melalui kekerasan oleh kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Misalnya, dalam pemerintahan militer, kelompok yang berkuasa sering mengendalikan orang lain dengan kekerasan. Pada negara demokrasi, kekerasan diterapkan melalui sistem hukum, misalnya ada aturan yang mengatur tentang mobil yang boleh atau tidak boleh diparkir; melalui jalan satu jalur atau dua jalur.
2. Membujuk orang untuk patuh secara sukarela. Atau dengan kata lain melaksanakan kekuasaan dengan penciptaan persetujuan atau menciptakan kerelaan untuk membiarkan kekuasaan itu berjalan. Apabila ini dilakukan, hal tersebut akan lebih efektif daripada harus terus-menerus melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Agar ini bisa tercapai, perlu ada ideologi, yaitu sesuatu yang membuat keyakinan-keyakinan yang ingin ditanamkan penguasa kepada warganya menjadi terasa wajar, alami, dan masuk akal. Melalui cara ini, warga masyarakat akan kesulitan untuk menanyakan ideologi yang dominan.

Wacana politik dilandaskan pada satu prinsip, yaitu persepsi orang terhadap masalah-masalah atau konsep tertentu bisa dipengaruhi oleh bahasa. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh politisi adalah membujuk warga masyarakat untuk percaya pada validitas dari klaim-klaim

politisi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan implikatur. Implikatur adalah cara agar pendengar dapat memahami sendiri asumsi-asumsi di balik sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi itu secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi tambahan yang dapat dideduksi dari sebuah informasi tertentu. Perasaan *wajar* dan *masuk akal* dapat ditumbuhkan kepada pendengar dengan cara menaruh pendapat-pendapat dari pembicara/politisi di balik informasi tanpa harus mengungkapkannya secara terang-terangan. Karena pendengar akan kesulitan untuk mengidentifikasi atau menolak pandangan-pandangan yang dikemukakan dengan cara seperti itu, implikatur dapat digunakan untuk membuat orang secara tidak sadar menerima begitu saja pendapat-pendapat yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan lagi. Misalnya: Mari kita membawa perubahan.

Representasi Kekuasaan

Fairclough (1989) melihat bahwa bahasa merupakan politik kekuasaan. Teks dianalisis dengan memusatkan perhatian pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial. Sehubungan dengan itu, bahasa sebagai praktik sosial mengandung implikasi bahwa suatu tindakan adalah bentuk representasi ketika melihat realitas. Oleh karena itu, tuturan elit politik dan pemerintah merupakan bentuk representasi kekuasaan.

Representasi kekuasaan dalam tuturan elit politik/pemerintah mendeskripsikan bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan atau apa pun yang ditampilkan dan digambarkan dalam tuturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Fairclough yang melihat representasi dari dua hal, yaitu bagaimana seseorang, kelompok, dan gagasan ditampilkan dalam anak kalimat dan gabungan atau rangkaian antaranak kalimat. Representasi dalam anak kalimat berhubungan dengan seseorang, kelompok, peristiwa yang menggunakan bahasa dalam kaitannya dengan kekuasaan, misalnya pilihan kosakata yang digunakan untuk menampilkan dan menggambarkan sesuatu. Selanjutnya, penggunaan tata bahasa merupakan sebuah tindakan atau sebuah peristiwa. Kemudian, bagaimana mengungkapkan itu dalam kalimat. Demikian juga dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tuturan untuk mengaji representasi kekuasaan yang direalisasikan dalam pilihan kosakata dan struktur gramatikal dalam kalimat. Teori-teori kekuasaan yang telah dikemukakan digunakan untuk menganalisis tuturan elit politik dan pemerintah.

Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan suatu pendekatan yang bersifat kontemporer dan interdisiplin terhadap kajian wacana, yang menganggap bahasa sebagai suatu wujud manifestasi sosial dan berfokus pada penyelenggaraan dominasi sosial dan politik melalui teks dan tuturan (Fairclough, 1989). Mengacu pada teori wacana pascastrukturalis dan linguistik kritis, AWK berfokus pada aspek hubungan sosial, identitas, pengetahuan dan kekuasaan dibangun melalui teks tertulis dan lisan dalam masyarakat, termasuk di sekolah dan ruang kelas.

Analisis wacana kritis yang diperkenalkan Fairclough (1995) adalah bahasa dan kekuasaan. Bahasa dan kekuasaan sering dikaji para linguis dan juga kaitannya dengan praktik institusional, khususnya struktur sosial dan struktur politik. Dalam paparannya, isu yang menarik adalah dinamika sosial, politik, hegemoni, dan konteks historis. Secara fundamental menurut dia, variasi bahasa dideskripsikan baik secara makro maupun secara mikro dari berbagai bidang, seperti hukum, sosial politik.

Analisis wacana kritis dibangun dari tiga orientasi teori. Pertama, AWK diwarnai oleh pemikiran postsrukturalisme yang menganggap bahwa teks memiliki fungsi konstruktif dalam membentuk tindakan dan identitas manusia. Kedua, AWK dipengaruhi oleh sosiologi Bourdieu yang berasumsi bahwa praktik tekstual yang aktual dan interaksi dengan teks menjadi bentuk-bentuk manifestasi aset budaya. Ketiga, AWK dipengaruhi oleh teori budaya neomarxisme yang berasumsi bahwa wacana dihasilkan dan digunakan dalam konstelasi ekonomi politik. Jadi, wacana menghasilkan dan menggunakan kepentingan-kepentingan ideologi, pergerakan, dan formasi sosial yang lebih luas dalam bidang-bidang tersebut (Hall, dalam Yassi, 2007). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa AWK diperuntukkan mengkaji wacana pada tiga dimensi:

1. mengkaji teks bahasa lisan atau tuturan,
2. mengkaji penyelenggaraan wacana yang meliputi proses-proses terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi teks,
3. mengkaji peristiwa-peristiwa diskursif sebagai contoh-contoh dari manifestasi sosiokultural.

Berdasarkan uraian tersebut, Van Dijk (1995) menegaskan bahwa analisis wacana kritis adalah suatu model wacana yang merupakan tipe analisis yang menelaah perlakuan yang tidak benar terhadap kekuasaan masyarakat, terhadap hukum yang melindungi penguasa, dan ketidakadilan. Semua hal tersebut dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan dalam konteks sosial dan politik. Lebih lanjut ditambahkannya bahwa analisis wacana kritis adalah salah satu jenis studi wacana secara kritis yang mengkaji hubungan antara wacana, kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan sosial pada masing-masing hubungan sosial.

Pendapat senada dikemukakan oleh Fairclough (1989) dan Van Dijk (2001) bahwa AWK adalah salah satu jenis kajian analisis wacana yang memusatkan studinya pada eksplanasi hubungan dialektis antara bahasa/praksis linguistik, teks/praksis wacana, dan budaya/praksis sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Fairclough (1995) mengatakan bahwa analisis wacana berupaya menggali makna dalam teks, bahasa dalam hubungannya dengan proses sosial melihat teks berfungsi secara ideologi dan politik dalam suatu konteks, serta hubungan lebih luas dalam perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fairclough (1995) lebih lanjut memberikan gambaran bahwa analisis wacana kritis memandang wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam hal ini, analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, Fairclough menjelaskan bahwa analisis wacana kritis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Wacana dipandang sebagai sebuah tindakan. Artinya, wacana merupakan bentuk interaksi yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, mendebat, bereaksi, dan menyanggah.
2. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, baik latar situasi, peristiwa, maupun latar tempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Cook (1994:1) yang menyatakan bahwa analisis wacana juga mempertimbangkan konteks dari komunikasi dan dengan siapa, dalam situasi apa, dan melalui medium apa.
3. Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya. Dalam hal ini, setiap wacana yang muncul tidak dilihat sebagai sesuatu yang empiris dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan.
4. Wacana dipandang sebagai sebuah konsep ideologi. Ideologi juga merupakan salah satu karakteristik dan analisis wacana kritis. Hal ini dapat dipahami karena teks, baik yang tertulis maupun lisan, merupakan bentuk praktik atau perwujudan dari ideologi tertentu.

Pada dasarnya, pendekatan analisis wacana kritis ini cukup bagus digunakan untuk menganalisis wacana karena dapat menyingkap makna sosial dibalik sebuah teks, dibanding dengan pendekatan analisis wacana yang hanya mengkaji aspek-aspek struktural dari sebuah teks, baik dari segi gramatikal maupun leksikal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu piranti analisis wacana atau teks yang lebih cocok, yaitu analisis wacana kritis. Pendekatan analisis wacana pada tuturan elit politik pada tingkat nasional inilah yang penulis gunakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis wacana kritis (AWK), ditinjau dari sudut analisis datanya. Ideologi sebagai ciri khas analisis wacana kritis digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis tuturan elit politik pada tataran nasional.

Metode dan Teknik Penyediaan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan metode simak disertai dengan tekniknya. Metode simak dimaksudkan untuk menyimak tuturan-tuturan elit politik pada tataran nasional. Metode ini dilanjutkan dengan teknik dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjut berupa teknik bebas libat cakap, rekam, dan catat. Teknik dasar yang berupa teknik sadap digunakan untuk menyadap tuturan elit politik. Teknik bebas libat cakap dimaksudkan penulis untuk menyadap tuturan elit politik tanpa terlibat dalam pembicaraan tersebut, disertai dengan teknik rekam dan catat (Sudaryanto, 1993).

Sumber Data

Data penelitian ini adalah tuturan para elit politik pada tataran nasional meliputi elit politik yang terlibat dalam pemerintahan dan legislatif.

Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan korpus data melalui perekaman dan pencatatan. Proses pengumpulan data berlangsung sejak bulan Mei-Juli 2011. Penulis mengumpulkan 140 korpus data. Selanjutnya, penulis menetapkan tiga contoh untuk setiap komponen tuturan.

Analisis Data

Data yang terkumpul melalui rekaman dan catatan dianalisis berdasarkan analisis wacana deskriptif kualitatif secara eklektik.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Istilah-Istilah dalam Bidang Politik

Data yang dikemukakan berikut ini merupakan istilah yang sering muncul, baik dalam media cetak maupun media elektronik. Data yang dimaksud seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Mangkir
2. Buronan
3. Teroris
4. Retorika
5. Jargon
6. Moratorium
7. Status quo
8. Eksekusi
9. Investigasi
10. Anulir
11. Pemakzulan
12. Mendiskreditkan

Ada sekitar dua belas istilah yang produktif digunakan dalam dunia politik. Khususnya pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya dan elit politik digunakan untuk mengkritik, memengaruhi, mengejek, menyindir, dan memuji pelaksanaan roda pemerintahan.

Kelompok Kata dalam Bidang Politik

1. Konfigurasi politik
2. Borok politik
3. Kontrak politik
4. Sikap politik
5. Keputusan politik
6. Komunikasi politik
7. Politik pragmatis

8. Tsunami politik
9. Ilmuwan politik
10. Konsolidasi politik
11. Kompromi politik
12. Praktik percaloan
13. Negara kleptokrasi
14. Melebarkan sayap
15. Pelatihan teroris
16. Pepesan kosong
17. Jauh panggang dari api
18. Polemik ambang batas
19. *Parliamentary threshold*
20. Stempel haram
21. *Fit and propert test*
22. Pahlawan devisa

Penggunaan istilah yang berbentuk kelompok kata dalam bidang politik bertujuan untuk menampilkan sesuatu atau merepresentasikan kekuasaan. Misalnya, kontrak politik digunakan untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan antarpantai politik tentang penyelenggaraan kekuasaan. Jadi, pilihan kata/kelompok kata dalam merepresentasikan kekuasaan yaitu bagaimana realitas ditandai dalam bahasa dan bagaimana bahasa itu memunculkan realitas bentukan tertentu.

Penggunaan Modus Kalimat

Modus kalimat adalah cara mengekspresikan kalimat kepada orang lain.

- a. Kalimat Deklaratif (Rincian)

Kalimat deklaratif dominan digunakan dalam wacana politik, baik secara lisan maupun secara tertulis pascareformasi ini. Kecenderungan ini tampaknya berlaku pada wacana-wacana yang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa elit politik Indonesia berperan sebagai pemberi informasi, sedangkan masyarakat Indonesia sebagai penerima informasi. Penggunaan kalimat deklaratif dalam wacana politik dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

 - (1) “GNB telah berbuat lebih dari sekedar menghindari dan keluar dari situasi Perang Dingin. GNB telah turut membentuk tata dunia, membatasi penyebab konflik, serta mempertahankan dan menyebarkan perdamaian” (SBY, 26 Mei 2011)
 - (2) “Saya menyimak, mendengarkan, dan mendapatkan pemberitahuan, cukup banyak komentar, kritik, dan bahkan serangan terhadap pemerintah dari politisi, pengamat dan anggota DPR; dan itu dibenarkan dalam negara demokrasi. Negara demokrasi juga memberikan hak kepada pemerintah memberi penjelasan tentang apa yang disoroti itu” (SBY, 28 Juni 2011)
 - (3) “Saya tidak tahu kenapa saya yang menjadi sasaran tuduhan atau pemecatan itu. Saya itu bukan anggota dewan kehormatan. Yang duduk di situ adalah tokoh demokrat yang sangat dihormati. Ada Pak SBY, Pak Amir Syamsuddin, Pak E.E. Mangindaan, dan Ketua Umum Anas Urbanungrum. Mereka orang-orang terhormat. Bagaimana saya memengaruhi mereka? (A.M., 1 juni 2011)

Pernyataan (1) dan (2) menempatkan penutur (elit politik) sebagai pemberi informasi dan petutur (masyarakat Indonesia) sebagai penerima informasi. Maksudnya, penutur menyatakan sesuatu kepada orang lain atau masyarakat Indonesia bahwa kegiatan GNB telah berkembang lebih luas membentuk tata dunia, mengatasi penyebab konflik, serta

mempertahankan dan menyebarkan perdamaian. Tuturan itu diungkapkan melalui penggunaan kalimat deklaratif dengan menggunakan rincian seperti yang telah dikemukakan di atas.

Seorang penguasa tentu ingin mendapatkan citra yang baik di mata masyarakatnya. Oleh karena itu, penutur mengungkapkan keberhasilan gerakan nonblok, seperti membentuk tatanan dunia, mengatasi penyebab konflik, dan menyebarkan perdamaian. Kesemuanya itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah selaku penguasa. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat, yang selama ini sudah mulai berkurang.

Selanjutnya, pada kalimat (3) penutur menyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia sekaligus mengelak tuduhan yang ditujukan kepada penutur terkait pemecatan Nazaruddin sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Informasi tersebut juga disampaikan melalui kalimat deklaratif dengan merinci kegiatan yang dilakukan serta perlakuan yang diterima dari presiden oleh penutur.

Pengelakan dalam kalimat (3) mencerminkan sikap penguasa selaku pemegang kekuasaan tidak menerima tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pengelakan terhadap tuduhan biasa terjadi, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang lain. Upaya pengelakan itu disertai dengan menyebut tokoh-tokoh politik yang lebih kuat pengaruhnya. Jadi, menurut penutur hal itu tidak mungkin dilakukan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan kalimat deklaratif dalam tuturan politik dapat berimplikasi pada posisi penutur dan petutur dalam peristiwa komunikatif. Sebuah kalimat deklaratif dapat menjalankan fungsi tindak ujaran. Representasi kekuasaan tecermin dalam tiga kalimat deklaratif di atas. Kalimat (1), penutur merepresentasikan kekuasaan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan perdamaian. Kalimat (2), penutur merepresentasikan kekuasaan yang ingin ditunjukkan, yaitu pemerintah selaku pemegang kekuasaan menyampaikan keluh-kesahnya terhadap kritik yang ditujukan kepadanya. Namun, pemerintah juga mengakui bahwa negara Indonesia yang dicintai ini adalah negara demokrasi. Selanjutnya, kalimat (3), penutur merepresentasikan kekuasaannya dalam bentuk pengelakan karena masih ada yang lebih berpengaruh kekuasaannya daripada dirinya.

b. Kalimat Interogatif

Kalimat interogatif dalam tuturan politik biasa juga digunakan oleh elit politik sebagai upaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah.

- (4) ***“Mengapa pemerintah pusat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang jaminan surat sosial bagi masyarakat? Saya minta jangan ada kekerasan dalam unjuk rasa ini”*** (R, 3 Mei 2011)
- (5) ***“Akibat terorisme, orang akan merasa, hidup di Indonesia tidak lagi aman dan nyaman. Orang jadi Apatis. Apa ada gunanya Indonesia, apa gunanya Pancasila? Itu repot sekali”*** (A. Sy, 3 Mei 2011)
- (6) ***“Sampai kapan ia mau bersembunyi?”*** (J, 24 Mei 2011)

Kalimat (4), (5), dan (6) secara sintaksis adalah kalimat interogatif, secara semantis bukanlah pertanyaan, tetapi merupakan proposisi yang setara dengan kalimat deklaratif. Kalimat tersebut menjalankan fungsi sebagai tindak representatif. Kata tanya pada kalimat (4), yaitu *mengapa*, digunakan untuk menayakan alasan pemerintah menolak revisi Undang-Undang no. 13. Kalimat interogatif ini tidak mengharuskan pendengar (pemerintah) untuk menjawabnya. Pernyataan yang berbentuk kalimat pertanyaan ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Pernyataan (5) juga demikian, kalimat interogatif yang digunakan adalah kata tanya *apa* yang diulang sebanyak dua kali dan berfungsi sebagai penegas untuk menanyakan apa gunanya Indonesia dan apa gunanya pancasila. Secara tersirat pernyataan ini merupakan bentuk kekesalan elit politik akibat ulah teroris. Penutur tidak merasa nyaman lagi tinggal di Indonesia. Pernyataan itu sebagai salah satu bentuk protes terhadap pemerintah. Sehubungan dengan itu,

pemerintah selaku penguasa tidak dapat menciptakan rasa aman terhadap masyarakat Indonesia. Bentuk kalimat pertanyaan seperti ini merupakan penegasan kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak memerlukan jawaban.

Penutur menyatakan sesuatu kepada orang lain sekaligus sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan masyarakat tentang revisi undang-undang jaminan sosial dan dampak dari aksi terorisme, sedangkan pada kalimat (6) terkait dengan pelarian Nazaruddin ke luar negeri dan bersembunyi di sana. Sehubungan dengan itu, J mengeluarkan pertanyaan kepada masyarakat tentang waktu persembunyian Nazaruddin dengan menggunakan pertanyaan *sampai kapan?* Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban dari mitra bicara. Hal yang diharapkan oleh penutur adalah tindak nyata dari pemerintah sehubungan dengan pelarian Nazaruddin sehingga tidak lagi menimbulkan kekesalan pada diri penutur dan masyarakat akibat tudingan-tudingannya selama ini kepada partai politik dan pemerintah.

Uraian ketiga pernyataan yang berbentuk kalimat interogatif menunjukkan bentuk protes elit politik terhadap pemegang kekuasaan mengenai rasa aman masyarakat Indonesia dan menyangsikan kesungguhan pemerintah dan pelaku kejahatan untuk bersikap arif dan bertanggung jawab. Kalimat interogatif ini merupakan salah satu jenis kalimat yang dapat digunakan dalam dunia politik untuk mengkritik pemerintah.

c. Kalimat Imperatif

Modus kalimat yang ketiga adalah kalimat imperatif. Elit politik juga menggunakan jenis kalimat ini dalam menuturkan wacana politiknya.

(7) *“Pemerintah harus lebih tegas. Masyarakat juga harus lebih awas. **Jangan tunjukkan simpati pada mereka!**”* (Sy. M, 3 Mei 2011).

(8) *“Apa pun putusannya, apakah Abu Bakar Baasyir menerima atau tidak, ada mekanismenya. Kita hormati. Negara harus tetap aman. **Tidak boleh ada masalah baru yang sebenarnya sama-sama tidak dikehendaki!**”* (SBY, 20 Juni 2011).

(9) *“**Silakan saja periksa, kalau saya salah. Silakan diproses!** Sekali lagi saya tegaskan bahwa sebaiknya dibuka saja semuanya. Biarkan para penyidik KPK bekerja.”*(AM, 12 Juni 2011).

Pernyataan (7) merupakan cuplikan pernyataan Syafii Maarif yang menanggapi maraknya aksi teroris di Indonesia. Dalam pernyataan tersebut dia menggunakan tiga kalimat imperatif, yaitu pemerintah harus tegas; masyarakat harus awas, dan jangan tunjukkan simpati pada mereka. Pernyataan itu ditandai oleh peringatan dengan penggunaan konstruksi *jangan*. Secara semantis pernyataan itu merupakan bentuk perintah kepada pemerintah dan masyarakat, dan sekaligus sebagai larangan.

Pernyataan (8) merupakan pernyataan presiden terkait penanganan kasus Baasyir sebagai terdakwa kasus teroris. Dalam pernyataan tersebut, penutur menggunakan klausa *tidak boleh ada masalah baru*. Pernyataan itu menggunakan konstruksi tidak boleh dan secara semantis merupakan bentuk larangan yang diawali oleh konstruksi *harus* sebagai perintah. Pernyataan itu juga secara pragmatik memberikan pembebanan kepada teman tutur (masyarakat) untuk tidak melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh penuturnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan bahasa, khususnya penggunaan kalimat imperatif dalam menjalankan kekuasaannya untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat.

Pernyataan (9) terkait dengan kasus dugaan suap kasus Seskemenpora. Dalam pernyataan tersebut, AM menggunakan kalimat imperatif dengan konstruksi *silakan*. Pernyataan ini secara semantis merupakan bentuk perintah dari penutur kepada mitra tutur. Dalam hal ini, penutur memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki penuturnya. Kalimat tersebut secara pragmatis memberikan kesempatan kepada mitra tutur untuk melaksanakan tindakan pemeriksaan. Secara psikologis, pemeriksaan itu sulit dilakukan terhadap seorang pejabat negara dan elit politik karena pengaruh jabatannya. Hal itu merupakan

tantangan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah memilih jenis kalimat imperatif tersebut untuk menjalankan kekuasaannya

Berdasarkan contoh-contoh yang telah dikemukakan, dalam kalimat imperatif digunakan pemarkah *jangan*, *tidak boleh*, dan *silakan*. Selain itu, dapat juga digunakan bentuk *berharap*, *imbau*, dan *verba imperatif*, pemarkah *supaya* + *verba imperatif pasif*.

Penggunaan Metafora

Metafora adalah ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak dapat dijangkau secara langsung dari lambang yang dipakai karena makna yang dimaksud terdapat pada predikasi ungkapan kebahasaan (Wahab, 1990). Dalam linguistik terdapat dua jenis metafora, yaitu (1) metafora kalimat dan (2) metafora nominatif, baik subjektif maupun objektif.

a. Metafora Kalimat

- (10) ***“Langit Jatim terkadang mendung yang bisa jadi hujan dan airnya mampu menguningkan padi dan tumbuhan, bunga pun mekar ada yang merah, putih, dan ungu. Semua itu tetap dalam naungan langit biru”*** (A, 10 Juni 2011).
- (11) ***“Saya sependapat, KPK bisa menjadikan Nazaruddin sebagai saksi untuk kasus yang juga menjerat sesmenpora ini. KPK harus jeli melihat kasus ini. Bisa jadi ada banyak orang yang diduga bermain di dalamnya. Dengan dia menjadi saksi, dia bisa memberi keterangan-keterangan tersendiri yang bisa saja membantu kasus itu. Jangan sampai ini menjadi gurita kasus yang terus melebar, tapi menggantung di tengah jalan”*** (A, 25 Mei 2011).
- (12) ***“Jadi, dia tidak mau bergerak lebih jauh memberikan hukuman terlalu banyak kepada Nazaruddin karena takut nyanyiannya terlalu kencang”*** (Z, 25 Mei 2011).

Pada pernyataan (10), penutur menggunakan bentuk metafora kalimat dalam memberikan komentarnya terhadap Partai Demokrat. Partai Demokrat diterpa masalah, salah satu di antaranya masalah pembangunan wisma atlet yang melibatkan kader Partai Demokrat yang dituding melakukan korupsi. Permasalahan yang menimpa Partai Demokrat diumpamakan seperti mendung yang terdapat di langit di Jawa Timur. Mendung itu dapat menurunkan hujan lalu menyuburkan tanah dan beragan warna bunga. Hal itu berarti bahwa keberagaman dalam partai masih tetap dalam satu naungan, yaitu Partai Demokrat. Adapun baju seragam warna biru yang digunakan oleh Partai Demokrat disimbolkan dengan langit biru.

Bentuk metafora yang digunakan elit politik tersebut sebagai support terhadap kader-kader partai yang diterpa masalah. Penutur mengharapkan kepada kader partai agar tetap bersemangat dan ceria seperti bunga yang sedang mekar. Apalagi Partai Demokrat sebagai partai penguasa harus tetap eksis di mata masyarakat.

Selanjutnya, pada pernyataan (11), penutur menggunakan bentuk metafora kalimat untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang kasus Nazaruddin. Pada pernyataan itu dikhawatirkan masalah yang akan menjadi meluas seperti digambarkan oleh penutur sebagai gurita yang memiliki banyak cabang. Penutur memberikan apresiasi kepada KPK karena berani menjadikan Nazaruddin sebagai saksi atas kasus sesmenpora. Hal itu ditunjukkan peran bahasa yang dapat dijadikan alat untuk mendukung tugas penegak hukum.

Pada pernyataan (12), penutur menggunakan metafora kalimat yang masih terkait dengan pernyataan-pernyataan Nazaruddin selama dalam pelariannya. Oleh karena itu, penutur membandingkan pernyataan-pernyataan itu sebagai nyanyian yang terlalu kencang karena seringnya mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. Pernyataan itu merupakan bentuk kritikan terhadap pemerintah dengan menggunakan perumpamaan *nyanyiannya terlalu kencang*. Sehubungan dengan itu, sewaktu Nazaruddin dalam pelariannya beberapa kali dia menuduh rekan sesama partai ikut menerima suap. Tuduhan-tuduhan itulah yang diibaratkan sebagai

nyanyian yang ditakuti oleh sebahagian elit politik. Pernyataan seperti itu menunjukkan peran bahasa sebagai sarana untuk mengkritik pelaku kekuasaan.

b. Metafora Nominatif

- (13) “*BK DPR setahu saya hanya bisa menindak ketika adanya pelanggaran etika dan moral, soal bersalah atau tidak, itu institusi hukum. Permasalahannya, BK sendiri belum bergerak secara jauh soal Nazaruddin ini. Saya melihat Partai Demokrat melempar **bola panas** kepada BK dan institusi penegak hukum*” (B, 24 Mei 2011)
- (14) “*Soal elite politik di Riau yang pindah “**perahu**” tidak hanya Rusli Zainal dan Raji Bambang, tetapi juga ada beberapa elite melakukan hal sama*” (Sy., 30 Juni 2011)
- (15) “*Merosotnya dukungan ke Partai Demokrat adalah dampak **tsunami politik** yang melanda partai itu berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat korupsi. Kasus dugaan pemalsuan surat MK hanya pintu masuk. Hal ini hanya percikan poin untuk menelusuri kemungkinan ada kursi ilegal di segala strata.*” (Arif Wibowo) (Kompas, Jumat, 17 Juni 2011)

Pada pernyataan (13), penutur mengungkapkan peran Badan Kohormatan DPR hanya menindak pelanggaran etika dan moral lalu dia memprotes DPR belum bergerak jauh menangani kasus Nazaruddin. Selanjutnya, penutur memprotes kinerja elit Politik Demokrat dengan menggunakan gaya metafora “*Partai Demokrat melempar bola panas.*” Bentuk ini dipilih oleh penutur untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang melilit beberapa elit Partai Demokrat yang sulit diselesaikan seperti bola yang menggelinding tidak jelas arahnya.

Pada pernyataan (14), penutur mengungkapkan elit partai poliik tertentu jika merasa tidak nyaman lagi di partainya pindah ke partai lain yang lebih menjanjikan. Hal ini digambarkan dengan *pindah perahu*, maksudnya *pindah partai*. Partai diibaratkan sebagaimana perahu yang berlayar untuk meraih keuntungan.

Masih terkait dengan Partai Demokrat, penutur menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat dan semakin merosotnya dukungan masyarakat terhadap partai tersebut diumpamakan sebagai tsunami yang ombaknya sangat kencang dan dapat meluluhlantakkan semua yang ada di sekitarnya. Guncangannya sangat dahsyat dan menakutkan. Oleh karena itu, penutur mengungkapkannya dengan menggunakan gaya metafora, yaitu dengan menggunakan istilah *tsunami politik*. Permasalahan yang pelik dan ribet diibaratkan seperti tsunami yang dapat menghempaskan manusia.

Dengan demikian, bentuk metafora digunakan oleh elit politik untuk menuduh dan mengkritik pemerintah.

Penggunaan Perumpamaan (Ibarat)

Perumpamaan adalah ibarat, amsal, persamaan, perbandingan atau pribahasa yang berupa perbandingan.

- (16) “*Saya mengimbau Saudara Nazar untuk tidak main tuduh asal-asalan. **Ibarat** orang panik yang lalu mencoba memukul bulan dan bintang di langit sana*” (Z, 25 Mei 2011)
- (17) “*Boleh jadi benar **perumpamaan** bahwa **Partai Demokrat sedang diguncang angin puting beliung**. Guncangan itu menyebabkan beberapa kader menjadi panik berlebihan sehingga mencoba menarik pihak luar terlibat dalam persoalan internal partai*” (B, 24 Juni 2011)

- (18) “*Merosotnya dukungan ke Partai Demokrat adalah dampak tsunami politik yang melanda partai itu berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat korupsi. Kasus dugaan pemalsuan surat MK hanya pintu masuk. Ini hanya percikan poin untuk menelusuri kemungkinan ada kursi ilegal di segala strata*” (AW, Jumat, 17 Juni 2011)

Pada pernyataan (16), penutur mengungkapkan kekesalannya terhadap Nazaruddin karena dituduh menerima suap terhadap kasus korupsi seskemenpora. Dia memakai ibarat, bagaikan orang panik yang memukul bulan dan bintang. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh Nazarudin itu merupakan pekerjaan sia-sia dan tidak tepat sasaran. Tuturan itu sebagai bentuk reaksi yang ditujukan kepada penutur yang diungkapkan melalui pengibaratan untuk lebih menegaskan bahwa dia tidak terlibat korupsi.

Selanjutnya, pada pernyataan (17), penutur mengungkapkan berbagai masalah yang sedang melilit Partai Demokrat. Bertubi-tubinya masalah tersebut menghampiri sehingga diungkapkan dengan pengibaratan angin puting beliung. Dampak angin puting beliung sama ganasnya dengan tsunami yang dapat meluluhlantakkan semua yang ada di sekitarnya. Ungkapan ini diibaratkan dengan permasalahan yang cukup pelik sedang dihadapi oleh Partai Demokrat, yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan partai itu. Semoga tidak terjadi. Penulis menganggap masalah partai Demokrat sudah cukup rumit dan bertubi-tubi sehingga diungkapkanlah ibarat tersebut.

Masalah yang dihadapi oleh Partai Demokrat seperti yang tertera pada pernyataan (18), penutur lain, yaitu AW, juga mengibaratkannya dengan *tsunami politik*. Maksudnya, permasalahan tersebut sudah cukup besar dan membahayakan sebagaimana tsunami yang terjadi di Aceh menelan cukup banyak korban karena kedahsyatannya.

Bentuk ibarat yang digunakan oleh elit politik merupakan salah satu variasi berbahasa, khususnya dalam tuturan politik. Penggunaan ibarat dimaksudkan untuk membicarakan masalah yang terkait dengan kekuasaan, misalnya memberikan saran, mengkritik, dan menuduh.

Klimaks

Klimaks adalah salah satu bentuk gaya berbahasa yang diungkapkan, mulai dari yang lebih sederhana lalu meningkat sampai yang lebih rumit.

- (19) “*Di situ saya akan ceritakan banyak hal mulai dari perjalanan pribadi saya, perjalanan di partai, perjalanan sampai permasalahan ini ada, saya dipanggil siapa, diancam siapa, saya akan ceritakan semua di situ*” (N, 1 Juni 2011)
- (20) “*GNB telah berbuat lebih dari sekedar menghindari dan keluar dari situasi Perang Dingin. GNB telah turut membentuk tata dunia, membatasi penyebab konflik, serta mempertahankan dan menyebarkan perdamaian.*” (SBY, 26 Mei 2011)
- (21) “*Untuk menjatuhkan presiden tidak bisa lagi hanya berdasarkan politik. Sekarang, presiden hanya bisa dijatuhkan kalau melanggar hukum. Misalnya, korupsi, suap, melakukan penghianatan terhadap negara, atau melakukan kejahatan besar. Itu saja alasannya. Diluar itu, (presiden) tidak boleh dijatuhkan*” (M. M.D., 12 Juli 2011)

Pernyataan (19) dikutip dari wawancara penutur dengan wartawan Metro TV, ketika berada di luar negeri. Penutur memilih menggunakan bentuk klimaks untuk mengungkapkan ide-idenya. Dia mengungkapkan secara bertingkat mulai dari perjalanan pribadinya, perjalanannya di partai, sampai permasalahan wisma atlet di Palembang. Rincian tersebut diungkapkan sebagai ancaman terhadap sesama elit politik di Partai Demokrat. Penutur menggunakan klimaks untuk mengancam elit politik terkait dengan permasalahan yang menimpa dirinya.

Pada pernyataan (20), presiden dalam pertemuan GNB berbicara tentang peran GNB yang dikemukakan dengan cara bertingkat mulai dari rincian yang lebih sederhana sampai pada klimaks, mulai dari membentuk tata dunia, mengatasi penyebab konflik serta mempertahankan dan menyebarkan perdamaian. Gaya klimaks inilah yang dipilih oleh penutur (presiden) untuk disampaikan kepada masyarakat tentang penciptaan perdamaian di muka bumi ini selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa presiden bersama dengan GNB tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sehingga masyarakat dapat bersimpati kepada pemimpinnya.

Sekaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja presiden dan pembantu-pembantunya, ketua MA mengeluarkan pernyataan seperti yang tertera pada pernyataan (21). Dia merinci pernyataannya secara bertingkat mulai dari korupsi, suap dan kejahatan besar, melakukan pengkhianatan terhadap negara. Maksud penutur di sini adalah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak mudah menjatuhkan presiden, apalagi hanya dengan alasan politik. Penggunaan bentuk klimaks digunakan dalam tuturan politik. Biasanya digunakan untuk mengancam sesama kader partai, menarik perhatian masyarakat, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kekuasaan.

Penggunaan Repetisi

Salah satu bentuk tuturan elit politik adalah menggunakan gaya repetisi. Maksudnya, dalam pernyataan politiknya ada kata-kata tertentu yang perlu diulang elit politik. Hal itu dilakukan untuk lebih menegaskan hal-hal tertentu kepada mitra tutur dan masyarakat secara umum. Penggunaan repetisi oleh elit politik dapat dilihat pada uraian berikut ini.

- (22) *“Kita mesti membangun karakter bangsa yang tangguh, karakter bangsa yang **tidak cengeng, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan**”* (SBY, 30 Juni 2011)
- (23) *“**Kami tidak tahu soal dana Rp 47 triliun. Kami tidak tahu soal Daniel Sparingga, kami juga tidak tahu soal kecurangan 80 juta suara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yang paling tahu adalah orang dalam sendiri**”* (BS, 4 Juni 2011)
- (24) *“Pastikan ada sinergi antara out put lulusan dan bicara bupati kebutuhan tenaga kerja. **Ajak bicara dunia usaha, ajak bicara gubernur, dan ajak bicara wali kota, agar klop antara kebutuhan dan yang dihasilkan perguruan tinggi**”* (SBY, 30 Juni 2011)

Bentuk yang diulang pada pernyataan (22) adalah *karakter bangsa* dan *tidak mudah mengeluh*. Penutur menggunakan gaya repetisi untuk menyampaikan gagasannya kepada masyarakat selaku penguasa. Sebagai seorang presiden, dia bermaksud menyampaikan kepada masyarakat bahwa karakter bangsa yang tangguh itu penting dimiliki oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bentuk karakter diulang dua kali. *Tidak mudah* juga diulang sebanyak tiga kali, yaitu *tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah menyalahkan*. Jadi, betul-betul presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengharapkan karakter bangsa yang tangguh, bertanggung jawab, dan mandiri.

Selanjutnya, pada pernyataan (23) dituturkan ketika banyak kecurangan terjadi, baik kecurangan dana maupun soal kecurangan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sehubungan dengan itu, penutur dalam hal ini yang terlibat dalam kekuasaan menyangkal semua kecurangan tersebut dengan menggunakan bentuk repetisi. Penutur bermaksud menegaskan kepada mitra tutur dan masyarakat bahwa memang dia tidak mengetahui soal kecurangan yang terjadi. Bentuk yang diulang adalah klausa *kami tidak tahu* sebanyak tiga kali. Hal itu biasa terjadi, pelaku kecurangan tidak mengakui perbuatannya, baik penguasa, tokoh politik, maupun masyarakat biasa. Bentuk perulangan dalam dunia politik digunakan untuk menegaskan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan.

Pada pernyataan (24), presiden mengomentari topik pendidikan khususnya penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Presiden mengharapkan adanya sinergi antara *output* dan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, presiden memilih menggunakan bentuk repetisi untuk menyampaikan gagasannya kepada pihak perguruan tinggi. Bentuk yang diulang adalah kelompok kata *ajak bicara* sebanyak tiga kali. Bentuk yang diulang itu sebagai penegasan dari inti pembicaraan, yaitu adanya sinergi antara *output* perguruan tinggi dan lapangan kerja.

Penggunaan Modalitas

Penggunaan modalitas dalam wacana politik sesuai dengan pertanyaan pokok yang dikemukakan oleh Fairclough (1989:26), yaitu fitur-fitur penting dari modalitas relasional dan modalitas ekspresif. Modalitas relasional berkaitan dengan masalah satu partisipan dalam kaitannya dengan partisipan yang lain dalam berinteraksi. Selain itu, modalitas ekspresif adalah modalitas yang berkaitan dengan masalah otoritas penutur terhadap kebenaran dan kemungkinan dari suatu representasi realitas. Modalitas ekspresif berkaitan dengan penilaian penutur terhadap kebenaran. Modalitas yang diuraikan dalam makalah ini adalah modalitas keharusan, keakanan, kemampuan, dan harapan.

a. Modalitas yang Menyatakan Keharusan

Modalitas yang menyatakan keharusan ditandai penggunaan kata-kata *harus*, *mesti*, *wajib*, *harusnya* dan *seharusnya*.

(25) “*Konsep membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Kita harus mengangkat harkat dan martabat orang desa yang selama ini marginal*” (AB, 28 Juni 2011)

(26) “*Polri harus mendalami pertemuan “kebetulan” antara Arsyad, Hasan, dan Dewi pada 16 Agustus 2009. Pengakuan Arsyad menjadi poin penting untuk bisa dibuktikan apakah pertemuan itu terkait dengan surat palsu atau silaturahmi*” (T, 30 Juni 2011)

(27) “*Harus ada keberanian untuk menggantikan pembantu yang tidak cakap dan mengambil jarak dengan parpol*” (B, 30 Juni 2011)

Pernyataan (25) diungkapkan oleh penuturnya saat AB mengadakan sosialisasi Partai Golkar di desa-desa. Rupanya AB sudah mulai mencari dukungan masyarakat menghadapi pemilu 2014. Oleh karena itu, ia ingin menunjukkan simpatinya kepada masyarakat dengan menggunakan modalitas yang menyatakan keharusan pada pernyataannya, yaitu *konsep membangun di Indonesia harus dimulai dari desa*, serta *kita harus mengangkat harkat dan martabat orang desa*. Modalitas keharusan pada kalimat tersebut berimplikasi pada ajakan pada masyarakat desa yang dikunjunginya.

Pernyataan (26) terkait dengan topik surat palsu di Mahkamah Konstitusi yang ramai dibicarakan di media elektronik dan media cetak. Sebelum surat itu terbit, menurutnya ada pertemuan antara Arsyad, Hasan, dan Dewi. Sehubungan dengan itu, penutur menyatakan “*Polri harus mendalami pertemuan ‘kebetulan’ itu*”. Modalitas *harus* yang dikemukakan berimplikasi pada imperatif.

Pada pernyataan (27) topik yang dibicarakan adalah kinerja pemerintahan. Masalah kinerja ini ditanggapi oleh salah seorang elit politik (B). Dia menggunakan modalitas *harus* dalam pernyataan “*harus ada keberanian untuk menggantikan pembantu yang tidak cukup*”. Modalitas *harus* tersebut berimplikasi imperatif pada pemerintah yang wajib dilaksanakan.

b. Modalitas yang Menyatakan Kepastian

Modalitas yang menyatakan kepastian ditandai penggunaan kata-kata *pasti*, *tentu*, *saya yakin*, *saya percaya*, dan *tentunya*.

(28) “*Jadi, bisa dipastikan yang bersangkutan, baik Nazaruddin maupun Neneng, tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Tidak ada keterangan atau informasi yang disampaikan ke KPK mengenai ketidakhadirannya*” (JB, 11 Juni 2011)

- (29) “**Pasti** ada putra-putri bangsa siap melanjutkan estafet kepemimpinan, apakah presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Para gubernur, bupati, dan walikota juga harus demikian. Jangan dikira tidak ada lagi yang bisa melanjutkan sehingga harus menginginkan istri atau anak atau siapa pun. Berikan kesempatan kepada masyarakat luas” (SBY, 11 Juni 2011)
- (30) “Peran Nazaruddin **pastilah** sangat vital dalam pengungkapan kasus Seskemenpora” (KS, 27 Juni 2011)

Pada pernyataan (28) diungkapkan mengenai pemanggilan Nazaruddin dan Neneng terkait kasus korupsi. Ada yang menyangsikan kehadiran mereka berdua. Sehubungan dengan itu, JB menggunakan modalitas yang menyatakan kepastian bahwa mereka pasti tidak hadir seperti pada pernyataan “*jadi, bisa dipastikan yang bersangkutan...tidak hadir*”. Kepastian itu dipertegas lagi dengan menggunakan penghubung kalimat, *jadi...* yang bermakna menyimpulkan. Penutur memang sudah yakin bahwa yang bersangkutan tidak hadir di pengadilan.

Selanjutnya, pernyataan (29) terkait dengan topik beredarnya isu di kalangan masyarakat bahwa presiden mempersiapkan istri dan anaknya untuk menjadi presiden. Berdasarkan isu tersebut muncullah pernyataan presiden dengan menggunakan modalitas yang bermakna kepastian dalam pernyataannya, “*Pasti ada putra-putri bangsa yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan.*” Pernyataan itu didukung oleh modalitas yang menyatakan kemampuan pada pernyataan “*jangan dikira tidak ada lagi yang bisa...*” Jadi, secara tersirat presiden membantah tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa dirinya menyiapkan istri dan anaknya menjadi presiden.

Pernyataan (30) terkait dengan topik kasus korupsi di Seskemenpora. Nazaruddin termasuk salah seorang yang terkait dengan kasus itu. Lalu ia melarikan diri ke luar negeri. Dampak dari pelariannya itu KS mengeluarkan pernyataan yang menggunakan modalitas bermakna kepastian. “*peran Nazaruddin pasti sangat vital.*” Penutur memastikan seperti itu berdasarkan tindakan dari pelakunya melarikan diri dan kesaksian dari tersangka yang lain.

Pernyataan politik seperti yang tertera di atas, penutur bermaksud menyampaikan sesuatu yang pasti mengenai perbuatan yang telah dilakukan, dan kepastian tentang tidak dilakukannya sesuatu dalam hal penyelenggaraan negara.

c. Modalitas yang Menyatakan Kemungkinan

Modalitas yang menyatakan makna kemungkinan ditandai penggunaan kata-kata *dapat, mungkin, boleh, dapat saja, barangkali, boleh jadi, dan bisa jadi*.

- (31) “*Memang **mungkin** tidak menyiapkan istri dan anaknya, tetapi dia kan juga bisa menyiapkan iparnya*” (H, 11 Juni 201)
- (32) “*Pemerintah dan Partai Demokrat jadi sorotan, hulunya ke SBY. **Mungkin** saja dalam presepsi SBY, arah sorotan pada dasarnya kritik untuk mendiskreditkan dia*” (F, 11 Juni 2011)
- (33) “*Ini cara dia untuk menanggapi sorotan masyarakat kepada pemerintah dan Partai Demokrat. Menurut dia, kritik sudah mengarah ke pribadinya, seperti SMS yang sangat personal beberapa waktu lalu. Maka dia, meresponnya sebagai pribadi. **Mungkin** kritik yang ada sangat membekas pada perasaannya*” (F, 11 Juni 2011)

Pada pernyataan (31) penutur mengomentari topik mengenai presiden yang dituding menyiapkan isteri dan anaknya menjadi presiden. Pernyataan ini telah dibantah oleh presiden. Lalu muncul lagi pernyataan berupa sanggahan dari pernyataan presiden seperti yang tertera pada pernyataan (31). Dalam pernyataan tersebut, penutur menyanggah bantahan presiden dengan menggunakan modalitas yang menyatakan kemungkinan. Penggunaan modalitas kemungkinan H menduga adanya sesuatu yang mungkin berkenaan dengan penyiapan yang diduga tersebut.

Selanjutnya, pernyataan (32) masih menyangkut sorotan kepada presiden mengenai kinerjanya dalam pemerintahan dan di Partai Demokrat. Dalam pernyataan tersebut penutur menggunakan modalitas yang menyatakan kemungkinan yaitu *mungkin*. Melalui modalitas kemungkinan, F menduga presiden merasakan bahwa dirinya didiskreditkan.

Masih terkait dengan pernyataan sebelumnya, pernyataan (33) menyangkut sorotan masyarakat terhadap kinerja presiden. Penutur menggunakan modalitas yang menyatakan kemungkinan, yaitu *mungkin*. Melalui modalitas kemungkinan, F menduga adanya sesuatu yang mungkin berkenaan dengan pernyataan yang diduga. Dengan demikian, elit politik menggunakan modalitas kemungkinan dalam tuturannya untuk menyoroti sikap dan perilaku penyelenggara negara. Penutur mengungkapkan keraguannya dengan menggunakan bentuk modalitas kemungkinan.

d. Modalitas yang Menyatakan Kemampuan

Modalitas yang menyatakan makna kemampuan ditandai penggunaan kata-kata *dapat*, *bisa*, *mampu*, dan *sanggup*.

(34) “*Akibatnya, pejabat di daerah terpancing melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mencari anggaran bagi daerahnya. Praktik ini yang memunculkan mafia yang dapat membantu memuluskan anggaran bagi daerah dengan imbalan tertentu*” (L, 9 Juni 2011)

(35) “*Jelas ada keraguan. Kalau memilih Pramono, nanti bisa dituding nepotisme, sementara jenderal juga punya kesempatan sama*” (HA, 23 Juni 2011)

(36) “*Saya terus melakukan komunikasi dan mendorong yang bersangkutan untuk bisa datang memenuhi permintaan KPK guna memberikan keterangan kepada KPK*” (A, 11 Juni 2011)

Pernyataan (34) dikemukakan pada saat menanggapi kasus yang beredar di masyarakat bahwa anggota DPR dapat membantu melobi pemegang kebijakan untuk mencairkan dana ke daerah-daerah, ini biasa disebut dengan mafia anggaran. Sehubungan dengan itu, salah seorang elit politik (L) mengemukakan tanggapannya dengan menggunakan modalitas kemampuan, yaitu *dapat* pada pernyataan “*Praktik ini yang memunculkan mafia yang dapat membantu memuluskan anggaran dengan imbalan tertentu*”. Keberadaan modalitas *dapat* dalam kalimat itu menginformasikan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan “kemampuan” untuk melakukan sesuatu.

Pernyataan (35) dikemukakan terkait dengan topik pembicaraan pemilihan KSAD. Saat itu diungkapkan pernyataan yang bermakna kemampuan dengan menggunakan modalitas *bisa* pada pernyataan “*nanti bisa dituding...*”. Keberadaan modalitas *bisa* dalam pernyataan itu menginformasikan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan terbuka peluang untuk dituding. Dimensi kemampuan (peluang) ini semakin dipertegas oleh penggunaan bentuk *jelas ada*.

Selanjutnya, pernyataan (36) terkait dengan permasalahan korupsi yang ditangani KPK. Penutur menggunakan modalitas kemampuan, yaitu *bisa*. Keberadaan modalitas *bisa* pada pernyataan tersebut menginformasikan bahwa penutur menunjukkan kemampuan untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi, penggunaan modalitas yang menyatakan kemampuan digunakan oleh elit politik dan pejabat negara untuk mengomentari hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara.

e. Modalitas yang Menyatakan Harapan

Modalitas yang menyatakan makna harapan ditandai penggunaan kata-kata seperti *harap*, *mengharap*, *berharap*, *mudah-mudahan*, *semoga*, dan *kehendaknya*.

(37) “*KPK berharap, Presiden Yudhoyono dapat turun tangan untuk membantu Nazaruddin*” (BM, 27 Juni 2011)

(38) “*Saya berharap kader penggerak kita dapat mencapai target, 100 kader di tiap desa di seluruh Indonesia pada 2012*” (AB, 28 Juni 2011)

- (39) “*Sudah hampir 100 persen pemilik suara sudah ketemu saya. Dan **semoga** komitmen dan dukungannya tidak berubah untuk melihat PPP lebih bagus di masa mendatang*” (MP, 11 Juni 2011)

Pernyataan (37) terkait dengan topik masalah melanda Partai Demokrat, khususnya keterlibatan Nazaruddin selaku bendahara Partai Demokrat yang diduga melakukan korupsi. Dalam pernyataan itu digunakan modalitas yang bermakna harapan, yaitu *berharap*. Melalui modal *berharap*, penutur ingin menyampaikan kepada presiden bahwa dia menanti sesuatu agar terjadi, yakni kesediaan presiden untuk turun tangan menangani kasus Nazaruddin. Penegak hukum mengharapkan uluran tangan presiden menangani kasus anggotanya. Harapan itu lumrah terjadi, khususnya kasus Nazaruddin, ibarat benang kusut yang memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini pemimpinya untuk meluruskan permasalahan itu.

Selanjutnya, pernyataan (38) terkait dengan sosialisasi Partai Golkar di daerah-daerah. Penutur menggunakan modalitas yang bermakna harapan, yaitu *berharap*. Melalui modalitas *berharap*, elit politik Golkar ingin menyampaikan kepada kader Golkar bahwa dia mengharapkan sesuatu agar tercapai, yakni pencapaian target 100 kader setiap desa.

Harapan selanjutnya terdapat pada pernyataan (39) terkait dengan pemilihan ketua umum PPP. Penutur mengungkapkan harapannya dengan menggunakan modalitas yang bermakna harapan, yaitu *semoga*, penutur ingin menyampaikan kepada elit politik lain dan masyarakat Indonesia agar keinginannya menjadi ketua umum PPP tercapai. Harapan tersebut didukung oleh hampir 100% pemilik suara.

Penggunaan Bentuk Pasif dan Negatif

a. Penggunaan Bentuk Pasif

Penggunaan bentuk kalimat jenis ini dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu kepada teman tutur. Biasa juga disebut dengan kalimat pasif, biasanya ditandai oleh penggunaan bentuk *di-*. Bentuk kalimat ini hampir sama dengan kalimat deklaratif.

- (40) “*Dalam kabinet SBY, nama-nama para mentrinya nyaris tidak **dikenal** terkecuali berkait kasus atau musibah tertentu*” (G, 12 Juli 2011)

- (41) “*Pengangkatan beliau didasarkan pada prestasi di militer selama ini. Jabatan KSAD biasa **diisi** seseorang yang sebelumnya menjadi Panglima Kostrad*” (J, 30 Juni 2011)

- (42) “*Lembaga ini harus **diselamatkan**. Oleh karena itu, prioritas yang harus diselesaikan salah satunya adalah persoalan BK*” (PA, 26 Mei 2011)

Pernyataan (40) diungkapkan saat mengkritik menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet SBY karena nyaris tidak *dikenal*. Pernyataan itu diungkapkan dengan menggunakan bentuk pasif *di-*. Bentuk pasif digunakan untuk mengkritik pemerintahan SBY. Maksudnya, menteri-menterinya itu tidak dikenal publik. Biasanya yang seperti itu kemampuannya diragukan. Apalagi ditambahkan dengan pernyataan *kecuali terkait dengan kasus atau musiba*, semakin memberikan persepsi yang kurang baik.

Demikian pula pada pernyataan (41), penutur mengungkapkan bahwa pengangkatan Pramono sudah sesuai dengan prosudur, yaitu yang bersangkutan memang memenuhi syarat. Pernyataan itu diungkapkan dengan menggunakan pronomina orang ketiga tunggal (beliau).

Pada pernyataan (42) penutur mengungkapkan topik Penyelamatan Badan Kehormatan DPR. Topik itu diungkapkan oleh penutur dengan menggunakan bentuk pasif dan dipertegas dengan modalitas *harus*. Penggunaan kalimat yang berbentuk pasif dalam tuturan elit politik merupakan salah satu variasi dalam bertutur untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan.

b. Penggunaan Bentuk Negatif

Dalam pernyataan politik kalimat pasif biasanya lebih banyak digunakan elit politik dibandingkan dengan pilihan kalimat negatif. Kalimat negatif dalam bahasa Indonesia

menggunakan pemarkah negatif, yaitu *tidak* dan *bukan*. Pernyataan politik yang berbentuk negatif seperti yang tertera berikut ini.

- (43) “Pemerintah Indonesia tentu **tidak** bisa mencampuri proses hukum yang berlangsung di negara lain” (J, 20 Juni 2011)
- (44) “Apa pun putusnya, apakah Abu Bakar Ba’asyir menerima atau **tidak**, ada mekanismenya. Kita hormati. Negara harus tetap aman. Tidak boleh ada masalah baru yang sebenarnya sama-sama tak kita kehendaki” (SBY, 20 Juni 2011).
- (45) “Kemerosotan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Yudhoyono kemungkinan akan teruji terus-menerus dan dengan sendirinya. Pasalnya masyarakat mendapat kesan pemerintah **tidak** mampu menjalankan amanat konstitusi. Kewibawaan pemerintah pun hilang” (SB, 30 Juni 2011)

Pernyataan (43) merupakan tuturan elit politik terkait hukuman pancung Ruyati. Sehubungan dengan itu, J mengungkapkannya seperti pernyataan (43) di atas. Dalam pernyataan tersebut terdapat penggunaan bentuk negatif. Bentuk negatif pada pernyataan tersebut tidak mengandung proposisi negatif. Walaupun kalimatnya berbunyi, “*pemerintah Indonesia tentu tidak bisa mencampuri proses hukum di negara lain.*” Penutur menunjukkan sikap pembelaannya terhadap pemerintahan SBY, sekaligus menghormati hukum yang berlaku di negara Saudi Arabia. Bukan berarti penutur membiarkan salah seorang rakyat Indonesia dihukum pancung.

Pada pernyataan (44), tuturan SBY terkait dengan penanganan kasus Baasyir. Dalam pernyataan tersebut terdapat penggunaan bentuk negatif. Bentuk negatif pada pernyataan tersebut meliputi bentuk *tidak*, pada pilihan ada atau tidak, dan *tidak boleh*, serta bentuk *tak*. Bentuk tersebut mengandung proposisi negatif, *...Abu Bakar Baasyir menerima atau tidak, tidak boleh ada masalah baru, dan tak kita kehendaki.* Pernyataan itu menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penutur menghormati putusan penegak hukum dan mengharapkan negara ini tetap aman dengan menggunakan bentuk negatif.

Pada pernyataan (45) penutur mengungkapkan topik kemerosotan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan SBY. Pernyataan ini merupakan pernyataan kritik terhadap kinerja presiden. Pernyataan itu menggunakan bentuk negatif *tidak*, pada pernyataan *pemerintah tidak mampu menjalankan amanat konstitusi*. Tuturan elit politik yang menggunakan bentuk negasi dimaksudkan untuk membela pemerintah, melarang, dan sekaligus digunakan untuk mengkritik pemerintah.

Penggunaan Kata yang Menyatakan Penegasan

Kata-kata yang bermakna penegas biasanya ditandai penggunaan kata seperti *apalagi*, *bahkan*, dan *memang*. Penggunaan kata-kata penegas tersebut digunakan elit politik untuk mengemukakan gagasan-gagasannya terkait dengan pelaksanaan pemerintahan.

- (46) “Tidak bisa dibantah, energinya (Presiden Yudhoyono) sekarang terkuras oleh urusan partai. **Apalagi** saat ini ia lebih dominan, **bahkan** lebih dominan dari Ketua Umum Partai Demokrat (Anas Urbaningrum). Seharusnya persoalan itu diurus ke Ketua Umum” (S, 13 Juli 2011)
- (47) “Pemerintah **memang** belum sanggup menanggung semua biaya pendidikan tinggi sehingga peran masyarakat sangat diharapkan” (DS, 13 Juli 2011)
- (48) “Persoalan tidak cukup diselesaikan dengan membentuk satuan tugas (*satgas*). **Bahkan**, banyak *satgas* yang kontraproduktif sebab terlalu berlebihan. Sebenarnya kementerian dan lembaga banyak yang mampu menyelesaikan persoalan” (P, 28 Juni 2011)

Pada pernyataan (46), penutur mengkritik energi SBY yang habis terkuras pada urusan Partai Demokrat. Pernyataan itu diungkapkan dengan menggunakan bentuk penegas *apalagi* dan *bahkan*. Seharusnya, menurut penutur, urusan partai diserahkan kepada ketua partai, bukan

SBY yang menangani langsung. Seolah-olah pada pernyataan ini SBY itu tidak mau melepaskan Partai Demokrat ke tangan orang lain. Akibatnya, muncullah kritikan yang berbentuk penegas, yaitu bahwa energi SBY terkuras di partai.

Selanjutnya pada pernyataan (47), penutur mengungkapkan ketidakmampuan pemerintah dengan menggunakan bentuk *memang* sebagai bentuk penegas dalam pernyataan *pemerintah memang belum sanggup menanggung biaya PT*. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan bantuan masyarakat.

Pada pernyataan (48), penutur mengungkapkan masalah pembentukan satuan tugas yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Pernyataan itu diungkapkan dengan menggunakan bentuk penegas *bahkan* sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah bahwa satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah tidak efektif untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Penutur menyarankan kepada pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada kementerian dan lembaga lain yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa Indonesia. Dengan demikian, bentuk penegas dalam dunia politik digunakan untuk mengkritik dan menyatakan ketidakmampuan dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang representasi kekuasaan dalam tuturan elit politik pascareformasi ditemukan bahwa representasi kekuasaan tercermin dalam pilihan kata dan kelompok kata yang digunakan oleh elit politik dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan, dalam hal ini terkait dengan kekuasaan. Pilihan kata merupakan alat untuk mengekspresikan ide yang ada dalam benak penuturnya untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan.

Berbagai jenis kalimat juga digunakan oleh elit politik untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan. Pernyataan itu ada yang bermaksud untuk mempertahankan kekuasaan, meraih kekuasaan, dan mendukung kekuasaan. Banyak orang yang menginginkan menjadi penguasa karena menjadi penguasa merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh elit politik. Oleh karena itu, ada berbagai cara yang dapat digunakan dalam tuturan elit politik untuk menarik simpati masyarakat seperti menggunakan gaya bahasa, modus kalimat, dan menggunakan berbagai jenis modalitas dalam kalimat. Pernyataan itu ada yang mendukung, menyanjung, memberi saran, mengajak, menyindir, dan mengkritik pemerintah serta elit politik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wacana politik adalah kajian tentang kekuasaan dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Proses jalannya kekuasaan dapat menimbulkan reaksi pro dan kontra dari elit politik.

CATATAN

* Penulis berterima kasih kepada mitra bebestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Johar. 2009. *Tuturan Elit Politik Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Wacana Kritis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Austin, John Langshaw. 1978. *How to Do Things with Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London: Longman.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. New York: Longman Publishing.

- Foucault, Michel. 1972. "Uniting the Text: *A post Structuralist Reader*." Dalam Robert Young (ed.). London: RKP.
- Haliday, Michael, Alexander Kirkwood. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Haliday, Michael, Alexander Kirkwood, dan R. Hasan. 1985. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*; terjemahan Barori Tou dari *Language, Context, and Text: Aspects of Language in Social-Semiotic Perspective*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Levinson, Stephen. 1985. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahardjo, Mudjia. 2007. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN Malang Press.
- Richard, John Copland. 1995. *Tentang Percakapan*. Terjemahan Ismari. Surabaya: Airlangga University Press.
- Stubbs, Michael. 1997. *Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sudaryanto, 1993. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Thomas, Lauren Wareing, dan Shan. 1999. *Language Society and Power: An Introduction*. New York: Roulledge.
- Van Dijk, Teun Adrianus. 1985. "Introduction: The Role of Discourse Analysis in Society." Dalam Van Dijk T. (ed.). London: Academic Press.
- Van Dijk, Teun Adrianus. 2001. Political Discourse and Ideology. (Online), [http://www.discourse in society.org/disc.-pol-ideo.htm](http://www.discoursein-society.org/disc.-pol-ideo.htm), diakses 25 Maret 2007.
- Yassi, Abdul Hakim. 2007. *Transformasi Paradigma Analisis Teks ke Arah Analisis yang Lebih Berorientasi Sosial dan Kritis: Dari Analisis Wacana ke Analisis Wacana Kritis*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Bulan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar, 29-30 November.

SINGKATAN NAMA

| | |
|------|---------------------------|
| A | : Abdullah |
| A | : Anas |
| AB | : Abu Rizal Bakri |
| AM | : Andi Mallarangang |
| ARB | : Ahmad Rizal Bada |
| ASy. | : Ahmad Syarifs |
| ASy. | : Amir Syamsuddin |
| AW | : Arif Wibowo |
| B | : Benny |
| BS | : Bambang Soesatyo |
| D | : Didi |
| J | : Jimly |
| JA | : Julian Adrian |
| MM | : Mahfud MD |
| N | : Nazaruddin |
| P | : Purnomo |
| R | : Rike |
| SBY | : Susilo Bambang Yudoyono |
| SS | : Sebastian Salang |
| Sy | : Syahrani |
| Sy.M | : Syafii Maarif |
| TS | : Tipo Santosa |